

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN PUNGGING
KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Pungging, Januari 2022



CAMAT PUNGGING
PEMERINTAH KABUPATEN
KEC. PUNGGING
MOJOKERTO

AMSAR AZHAR SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan 1
	A. Latar Belakang 1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
	C. Struktur Organisasi 5
	D. Sistematika Penyajian 7
BAB II	Perencanaan Kinerja 9
	A. Rencana Kinerja Tahunan..... 9
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 10
BAB III	Akuntabilitas Kinerja 12
	A. Capaian Kinerja 12
	B. Analisis Capaian Kinerja 14
	C. Realisasi Anggaran 24
BAB IV	Penutup 28
	A. Kesimpulan 28
	B. Langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target 28
	C. Prestasi yang dicapai 29
Lampiran-lampiran	
1.	Matriks Renstra Kecamatan Pungging 2022 - 2026
2.	RKT Kecamatan Pungging Tahun 2021
3.	Rencana Aksi Tahun 2021
4.	IKU Kecamatan Pungging Tahun 2021
5.	Pengukuran Kinerja Tahun 2021
6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
8.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2021
9.	Struktur Organisasi
10.	Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Pungging mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Pungging juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Pungging berada pada kurang lebih 32 km dari timur ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 48.160 km² dengan kemiringan lahan 3-15 terdiri dari lahan pertanian dan non pertanian, lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Pungging terletak pada ketinggian rata-rata 25-30 m diatas permukaan air laut dan curah hujan 1504 mm. Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Pungging sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngoro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Trawas
Kec.Kutorejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Mojosari

PETA WILAYAH KEC.PUNGGING



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Pungging berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Pungging diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pungging

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pungging.

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2020, Kecamatan Pungging masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas masih kurang
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pungging dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Pungging termasuk daerah yang cukup subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.

2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Pungging ;
 3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.
- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
 4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Pungging selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pungging Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BabIV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kecamatan Pungging Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Pungging pada Tahun 2021 sebagai berikut :

RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN) TAHUN 2021
KECAMATAN PUNGGING

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.1 IKM Kecamatan 1.2 Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan 1.3 Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu 1.4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , Kesejahteraan Masyarakat 1.5 Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78 90% 700 pelayanan 90% 6 kegiatan

		1.6 Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan
		1.7 Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 fasilitasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.2 Nilai SAKIP	62 77

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN PUNGGING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1.1 IKM Kecamatan 1.2 Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai 1.3 Standart Pelayanan Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu 1.4 Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat 1.5 Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.6 Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.7 Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78 90% 700 pelayanan 90% 6 kegiatan 3 kegiatan 5 fasilitasi
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	2.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.2 Nilai SAKIP	62 77

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 33.400.000,00	PAPBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 214.935.000,00	PAPBD
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 37.555.003,00	PAPBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 39.320.000,00	PAPBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.159.873.008,00	PAPBD
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021		Rp. 3.485.083.011,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Pungging Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	-Nilai IKM	78	88,59	113%
		-Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	90%	100%	111%
		-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	700 pelayanan	1.117 pelayanan	159%
		-Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	90%	100%	111%
		- Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
		- Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
		- Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	5 fasilitasi	5 fasilitasi	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Pemerintahan Desa			
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	-Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	67,40	108%
		-Nilai SAKIP	77	77,30	100%

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Hal ini untuk melihat sejauh mana hasil kinerja tahun ini dengan tahun lalu

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis

Sasaran : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**, dengan indikator kinerja :

1. *IKM Kecamatan* dengan target nilai 78 sedangkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pungging Tahun 2021 sebesar 88,59 dengan demikian ada penambahan capaian kinerja sebesar 10,59 atau 113 %.
2. *Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan* dengan target 90% , sampai dengan akhir Tahun 2021 terdapat 1.117 pelayanan, dan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan sebanyak 1.117 pelayanan sehingga bisa dikatakan Capaian kinerjanya 100%
3. *Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu* dengan target 700 pelayanan dimana sampai dengan akhir Tahun 2021 terdapat 1.117 pelayanan yang terlayani tepat waktu , dengan demikian ada peningkatan capaian kinerja sebanyak 417 pelayanan atau 159%
4. *Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang , Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat ,* dengan target 90% dimana sampai

dengan akhir Tahun 2021 rekomendasi hasil koordinasi telah diterlaksana / ditindaklanjuti keseluruhan . Dengan demikian dapat dikatakan capaian kinerjanya 100%

Sasaran : **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan** dengan Indikator Kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 62 mendapatkan nilai akhir di Tahun 2021 sebesar 67,40 dengan demikian terdapat kenaikan 5,40 dari yang ditargetkan.
2. Niali SAKIP dengan target 77 mendapatkan nilai akhir Tahun 2021 sebesar 77,30 dengan demikian tercapai target 100%

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Pungging pada beberapa tabel - berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	- IKM Kecamatan	78	-	-	88,59
	- Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	90%	-	95%	100%
	-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	700 pelayanan	-	-	1.117 Pel
	- Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan,	90%	-	93%	100%

	Ketentrama dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat -Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa -Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 kegiatan 3 kegiatan 5 fasilitasi	-	-	6 kegiatan 3 kegiatan 5 fasilitasi
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	-Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah -Nilai SAKIP	62 77	-	-	67,40 77,30

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Kecamatan	-IKM Kecamatan	80 Dari tahun nol Renstra (2015)	88,59	8,59
	-Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart pelayanan	90%	100%	10%
	-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	-	1.117 pelayanan	1.117 pelayanan
	-Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat , Kesejahteraan Masyarakat	86%	100%	14%
	-Jumlah Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa	-	6 kegiatan	6 kegiatan
	-Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3 kegiatan	3 kegiatan
	-Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	5 fasilitasi	5 fasilitasi
Terwujud nya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas , Akuntabel, Bersih dan Transparan	- Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Dari tahun ke nol renstra (tahun 2015)	67,40	67,40
	- Nilai SAKIP		77,30	77,30

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	-IKM Kecamatan	88,59	-	-
	-Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart pelayanan	100%	-	-
	-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	1.117 pelayanan	-	-
	-Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat , Kesejahteraan Masyarakat	100%	-	-
	-Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 kegiatan	-	-
	-Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	-	-
	-Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 fasilitasi	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	- Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,40	-	-
	- Nilai SAKIP	77,30	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	-IKM Kecamatan	<u>33.400.000</u>	<u>-3,3</u>
		- Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart pelayanan	33.400.000	3,3
		-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	33.400.000	3,3
		-Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat , Kesejahteraan Masyarakat	<u>291.810.003</u>	<u>29,38</u>
		-Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	214.935.000	21,64

		-Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.320.000	3,95
		-Jumlah Fasilitas & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.555.003	3,78
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	- Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Nilai SAKIP	668.005.000 668.005.000	67,25 67,25

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	- IKM Kecamatan	79	88,59	113 %	33.400.000	33.202.500	99,40
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart pelayanan	90%	100%	111 %	33.400.000	33.202.500	99,40
	-Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu	700	1.117	159 %	33.400.000	33.202.500	99,40

<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan - Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 	<p>-Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman & Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>-Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>-Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>-Jumlah Fasilitasi & Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>90%</p> <p>6 keg</p> <p>3 keg</p> <p>5 fasilitasi</p>	<p>100%</p> <p>6 keg</p> <p>3 keg</p> <p>5 fasilitasi</p>	<p>111%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>291.810.003</p> <p>214.935.000</p> <p>39.320.000</p> <p>37.555.003</p>	<p>243.496.500</p> <p>192.313.500</p> <p>20.440.0000</p> <p>30.743.000</p>	<p>83,44</p> <p>89,47</p> <p>51,98</p> <p>81,86</p>
<p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	<p>- Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>- Nilai SAKIP</p>	<p>62</p> <p>77</p>	<p>67,40</p> <p>77,30</p>	<p>104%</p> <p>100%</p>	<p>668.005.000</p> <p>668.005,000</p>	<p>626.600.198</p> <p>626.600.198</p>	<p>93,80</p> <p>93,80</p>

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	- IKM Kecamatan	88,59%	85,08%	14,92%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	-Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,40%	93,80%	6,2%
		- Nilai SAKIP	77,30%	93,80%	6,2%

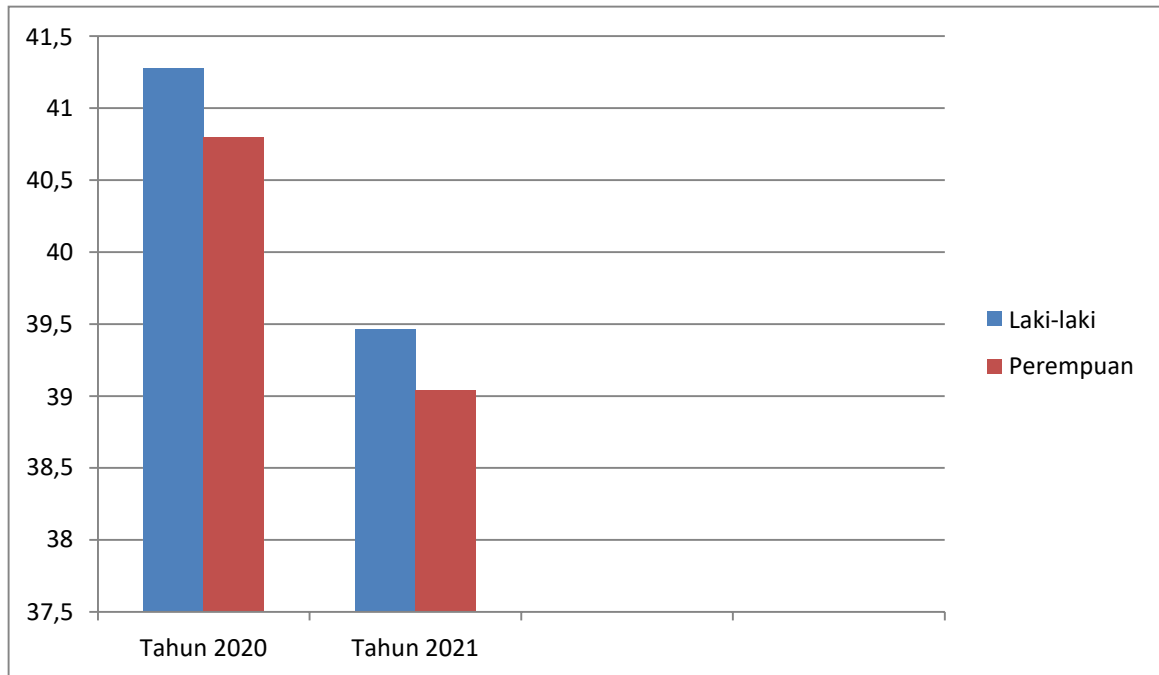
PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2021

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2020	41.274	40.795	82.069	101
2021	39.461	39.039	78.500	101

Sumber : data laporan kependudukan Kec. Pungging

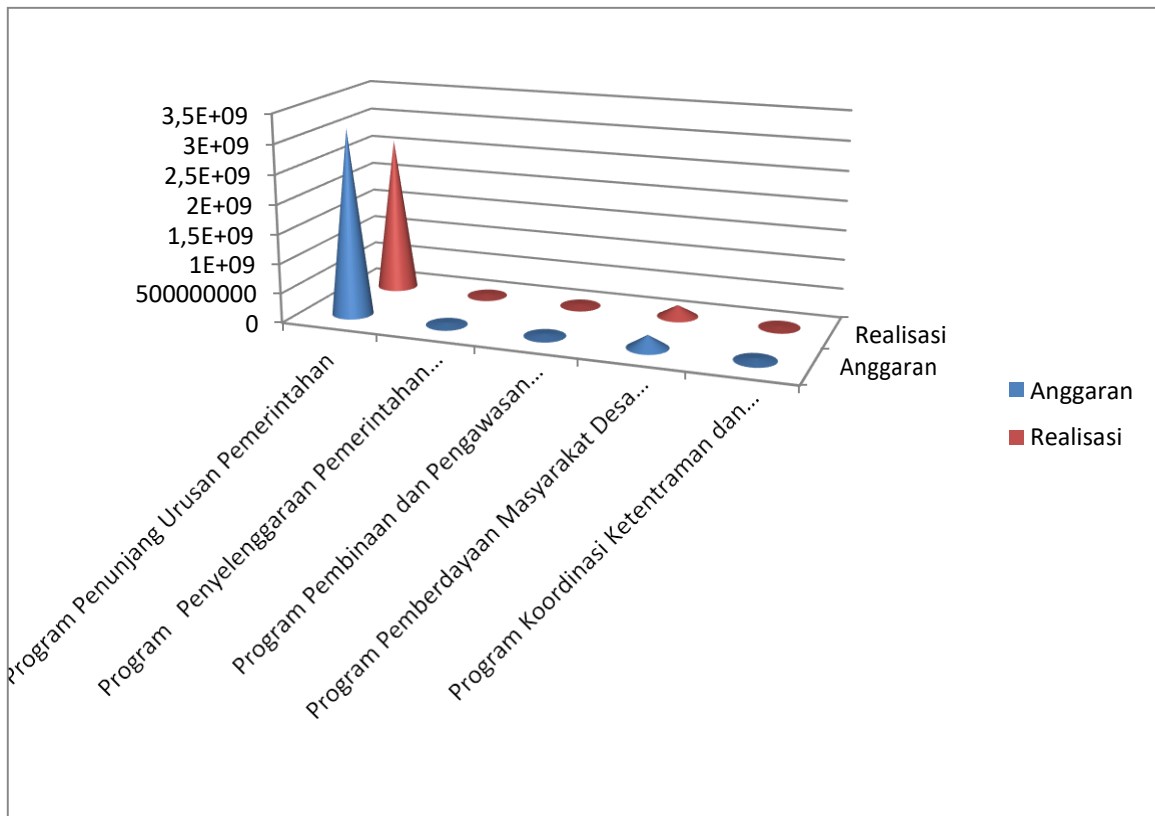
Jumlah Penduduk Kecamatan Pungging Tahun 2021 bila dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020 mengalami penurunan baik Laki laki maupun Perempuan , sebagaimana table berikut :



g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.9
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.400.000	33.202.500	99,43
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	214.935.000	192.313.500	89,47
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.555.003	30.743.000	81,86
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.320.000	20.440.000	52,00
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.159.873.008	2.633.381.564	83,33
.	JUMLAH	3.485.083.011	2.910.080.564	85,50



C. Realisasi Anggaran

Dari Pagu Anggaran Belanja (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Kecamatan Pungging Tahun 2021 sebesar **Rp.3.485.083.011,00** penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp.2.910.080.564,00** atau **83,50 %** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

	Sasaran	Program	Kegiatan	TA. 2021		% Capaian Program
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	33.400.000	33.202.500	99,40

		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	214.935.000	192.313.500	89,47
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.555.003	30.743.000	81,86
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteentraman dan Ketertiban Umum	39.320.000	20.440.000	52,00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.360.000	9.278.880	99,13
			2	Adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	2.436.868.008	2.006.781.366	82,35
			3	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.875.000	7.870.500	99,94
			4	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	288.240.000	274.152.853	95,11
			5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.000.000	256.000.000	89,82
			6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.430.000	39.271.340	87,13
			7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.100.000	40.026.625	95,07

Dari seluruh Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Indikator Kinerja secara keuangan belum bisa terealisasi 100% tetapi kegiatan sudah dilaksanakan seluruhnya dengan baik dalam arti tercapai 100%

Capaian Program untuk realisasi anggaran sebagaimana data diatas tidak mencapai 100 % dikarenakan sebagai berikut :

- Sisa lebih anggaran *belanja gaji pegawai* pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sisa lebih anggaran *Belanja Modal* pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sisa lebih anggaran *pengadaan kendaraan dinas roda dua* pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/penerangan gedung kantor
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Cetakan dan penggandaan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Bacaan dan Perundang-undangan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Bahan /Material
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik

- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Kendaraan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan Non Usaha
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifita Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sisa lebih anggaran pada Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sisa lebih anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
-

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari Indikator Kinerja Tahun 2021, seluruh Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada yang melebihi target dari yang ditetapkan diantaranya Indikator Kinerja *IKM Kecamatan* sebesar 113 % , *Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan* sebesar 111%, *Jumlah Paten yang terlayani tepat waktu* sebesar 159%, dan *Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat* sebesar 111% , *Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah* sebesar 108% serta *Nilai SAKIP* sebesar 100%

B. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun-tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari Total Belanja Kecamatan Pungging Tahun 2021 sebesar Rp. 3.485.083.111,00 dapat terserap sebesar Rp.2.910.080.564,00 atau 83,50%.

C. Prestasi yang dicapai :

- Juara I PBB-P2 Tahun 2021
- Juara I, Lomba Kreasi Kue Tradisional, Desa Bangun
- Juara III Lomba UP2K, Desa Bangun
- Juara III Lomba Posyandu Lansia, Desa Curahmojo
- Juara Harapan II Lomba Taman Posyandu , Desa Sekargadung
- Juara Harapan III Lomba Balita Sehat, Desa Mojorejo



RENCANA AKSI

***INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)***

***MATRIK RENSTRA
2022 – 2026***

STRUKTUR ORGANISASI

JUMLAH PENDUDUK

MATRIK RENJA

PENGUKURAN KINERJA

***RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)***

***PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021***

***LAPORAN KINERJA
TAHUN 2021***

LAMPIRAN

PELAKSANA